

ABSTRAK
PENYALAHGUNAAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
(TNKB) KENDARAAN DINAS DIGUNAKAN KEPENTINGAN PRIBADI

Oleh: Khoirur Roziqi

Dosen Pembimbing Utama: Yayuk Sugiarti, SH., MH.

Dosen Pembimbing Pendamping: Abshoril Fithry, S.H.,MH.

Penyalahgunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Kendaraan Dinas yang digunakan untuk kepentingan pribadi yang dimana diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terdapat pasal yang mengatur bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor. Namun pada pasal tersebut terdapat keaburan norma yang dimana setiap kendaraan bermotor wajib melengkapi STNKB dan TNKB namun dalam kendaraan dinas kedua tersebut sudah lengkap akan tetapi ada penyalahgunaan TNKB yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Perumusan yang dapat menimbulkan pokok-pokok permasalahan yaitu, bagaimana regulasi atau pengaturan dan sanksi terhadap penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) kendaraan Dinas yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Tujuannya yaitu untuk mengkaji dan menganalisis terhadap oknum yang menyalahgunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) kendaraan dinas secara aspek hukum pidananya.

Metode yang digunakan dalam metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang undangan (Statut approach) dan pendekatan konseptual (Konseptual Aproach) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan doktrin ilmu pengetahuan yang berkembang dalam ilmu hukum.

Hasil yang didapat tentu mengenai pengaturan penyalahgunaan TNKB yang memaknai tidak secara konperhensif. Terdapat keaburan terhadap penafsiran yang menyebabkan penyelewengan wewenang terhadap pengguna kendaraan bermotor, terutama pada kendaraan bermotor dinas. Dimana kendaraan dinas yang peruntukannya untuk menunjang, mempermudah kerja-kerja dan kegiatan kedinasan malah disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadi. Sehingga penyalahgunaan tersebut dapat merugikan negara, juga menimbulkan stigma atau penilaian negative dari masyarakat terhadap sebuah instansi pemerintah yang menyalahi wewenang tersebut.

Dengan demikian perlu pengawasan dan penegakan yang lebih konferhensif lagi terhadap oknum pelaku yang menyalahgunakan kendaraan dinas yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Sehingga perilaku tersebut tidak menjadi contoh yang tidak baik untuk generasi penerus bangsa.

Kata Kunci : Penyalahgunaan, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Kepentingan pribadi.

Abstract
MISUSE OF SERVICE VEHICLE NUMBER SIGNS (TNKB) FOR PRIVATE INTEREST

By : Khoirur Roziqi

Main Advisor: Yayuk Sugiarti, S.H., M.H

Supervising Lecture: Abshoril Fithry, S.H.,M.H

Misuse of Motorized Vehicle Number Marks (TNKB) for official vehicles used for personal purposes which is regulated in Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. There is an article which stipulates that every motorized vehicle operated on the road must be equipped with a motor vehicle registration certificate and a motor vehicle registration number. However, in this article there is a blurring of the norms where every motorized vehicle is required to complete a STNKB and TNKB, but in the case of the second service vehicle it is already complete, but there is misuse of the TNKB which is used for personal interests.

The formulation that can give rise to the main problems is, what are the regulations or arrangements and sanctions for the use of Motor Vehicle Number Tags (TNKB) on official vehicles that are misused for personal interests. The aim is to study and analyze individuals who misuse the Motorized Vehicle Registration Number (TNKB) of official vehicles in terms of criminal law aspects.

The method used in this research method uses a normative juridical research type and uses a statutory approach (Statut approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach), namely an approach that departs from the view of scientific doctrine that develops in legal science.

The results obtained are of course regarding the regulation of TNKB abuse which is not interpreted comprehensively. There is ambiguity in interpretation which causes abuse of authority towards motorized vehicle users, especially official motorized vehicles. Where official vehicles which are intended to support and facilitate official work and activities are actually misused by irresponsible individuals for their personal interests. So that this misuse can be detrimental to the state, as well as giving rise to stigma or negative judgment from the public towards a government agency that violates this authority.

Thus, more comprehensive supervision and enforcement is needed against individual perpetrators who misuse official vehicles used for personal interests. So that this behavior does not set a bad example for the nation's future generations.

Keywords: Misuse, Motor Vehicle Registration Number (TNKB), Personal interests.